

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bahar, Saafoedin, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Becker, Howard, 1963, *Outsiders: Study in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York.
- Effendi dkk, Sofian, 1996, *Membangun Martabat Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hug, George Clark dan Katheleen, 1998, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Hermaya, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Levin, Leah, 1987, *Hak-Hak Asasi Manusia: Tanya Jawab*, diterjemahkan oleh S.H. Nartomo, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Haidar, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Nuridin, M. Fadhil, 1990, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung.
- Poerwadarminto, WJS., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2005, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Sihombing, M. Justin, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Narasi, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subianto, Achmad, 2010, *Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa)*, Gibon Books, Jakarta.
- Subono, Darmawan Triwibowo dan Nur Iman, 2009, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih dari Sekadar Pengurangan Kemiskinan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2007, *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*, Pascasarjana STKS, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumarnonugroho, 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Hanindita, Yogyakarta.

- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suud, Mohammad, 2006, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Swasono, Sri Edi, 2005, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
- Thaib dkk, Dahlan, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty Cet. I, Yogyakarta.
- Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirosardjono, Soetjipto, 1988, *Gelandangan dan Pilihan Kebijaksanaan Penanggulangan*, LP3E, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yunus, Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3177).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1).
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 37).

C. TESIS, JURNAL, MAKALAH, DAN PENELITIAN

Arinanto, Satya, “Politik Perundang-Undangan: Beberapa Catatan”, *Makalah*, disampaikan dalam kuliah umum Magister Kenotariatan di Pontianak pada Tahun 2001.

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016.

I Gough, “Welfare Regimes in East Asia and Europe”, disampaikan pada Annual World Bank Conference on Development Economics Europe 2000, *Paper*, Paris, 27 Juni 2000.

Mokalu, Piter J., “Eksistensi Konstitusi Dalam Negara Demokrasi: Suatu Analisis Eksistensi UUD 1945 Dalam Tatanan Demokrasi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2001.

Mulyawan, dkk, Rahman, “Sosialisasi Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Daerah Secara Langsung Bagi Tokoh Masyarakat Dan Aparat Desa Didesa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut”, *Jurnal*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 16 No. 10 Juni 2006.

Pattiwael, John Im, *Hukum Untuk Si Miskin*, Harian Kompas tanggal 15 Februari 2010.

Prasetyo, Yosep Adi, Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, *Makalah*, disampaikan pada acara “Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia” yang berlangsung di Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 2008.

R. Lindenthal, “The Challenge of Social Protection for All: Policy Options for Indonesia”, Kerjasama antara UNSFIR dengan ILO, *Paper*, Jakarta: UNSFIR, 2004.

Radjagukguk, Erman, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000) Kampus UI-Depok Tgl. 5 Februari 2000.

Sujatmoko, Andre, “Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM”, *Makalah*, disampaikan pada pelatihan metode pendekatan pengajaran, penelitian,

penulisan desertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret 2009.

The National Coalition for the Homeless and The National Law Center on Homeless & Poverty, "A Dream Denied: The Criminalization of Homeless in U.S. Cities", Januari 2006.

Yusrizal, 2011, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

Zon, Fadli, *Haluan Baru Pemimpin Baru*, *Majalah*, Tani Merdeka (Media Komunikasi Petani), Edisi 9 Juli-Agustus 2008.

D. INTERNET DAN SUMBER LAIN

www.jimly.com/

<http://www.jogjaprovo.go.id>

www.gapri.org

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta

<https://kaukusperdagapengdiy.wordpress.com>